

**ANALISIS DETERMINAN REALISASI ANGGARAN DI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA PADA TAHUN 2016-2020**

SKRIPSI



Oleh:

Nama : Devandra Ananda Srivintara
NIM : 18313324
Jurusan : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
YOGYAKARTA
2022**

**ANALISIS DETERMINAN REALISASI ANGGARAN DI DAERAHISTIMEWA
YOGYAKARTA PADA TAHUN 2016-2020**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat
ujian akhir guna memperoleh gelar sarjana
jenjang strata 1
Program Studi Ilmu Ekonomi
Pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Devandra Ananda Srivintara
NIM : 18313324
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Pembimbing : Suharto S.E., M.Si

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
YOGYAKARTA
2022**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ilmu Ekonomi Pembangunan FBE UII. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Mei 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Devandra Ananda Srivintara', is written over a rectangular stamp. The stamp is partially obscured by the signature and contains some illegible text and a small graphic.

Devandra Ananda Srivintara

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Analisis Determinan Realisasi Anggaran di Daerah Istimewa Yogyakarta Pada Tahun
2016-2020

Nama : Devandra Ananda Srivintara
Nomor Mahasiswa : 18313324
Program Studi : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, 18 Mei 2022

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing



Suharto S.E., M.Si.

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

***ANALISIS DETERMINAN REALISASI ANGGARAN DI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA PADA TAHUN 2016-2020***

Disusun Oleh : **DEVANDRA ANANDA SRIVINTARA**

Nomor Mahasiswa : **18313324**


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari, tanggal: **Jumat, 24 Juni 2022**

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Suharto,,S.E., M.Si.




Penguji : Awan Setya Dewanta,Drs.,M.Ec.Dev.



Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



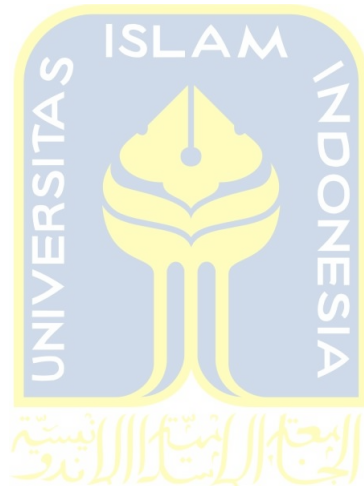

Johan Arifin, SE., M.Si, Ph.D., CFrA

MOTTO

يَسْبُحُونَ فَلَكَ فِي كُلِّ ۙ النَّهَارِ سَابِقُ اللَّيْلِ وَلَا الْقَمَرَ تُدْرِكُ أَنْ لَهَا يَتَّبِعِي الشَّمْسُ لَا

Lasy-syamsu yambagī lahā an tudrikal-qamara wa lal-lailu sābiqun-nahār, wa kullun fī
falakiy yasbaḥun (Surat Yasin ayat 40)

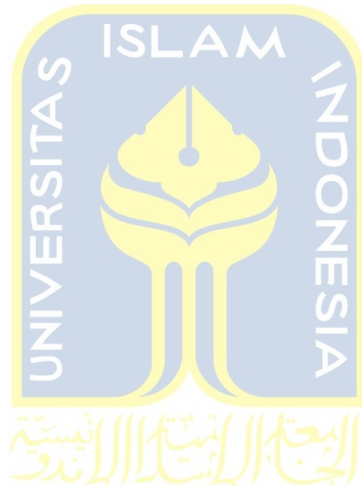
**Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malampun tidak dapat mendahului
siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya.**



HALAMAN PERSEMBAHAN



Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga tugas akhir penelitian dengan judul “**Analisis Determinan Realisasi Anggaran di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2016-2020**” dapat diselesaikan. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat kelulusan jenjang S-1 di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Penulis menyampaikan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bimbingan, saran, dan bantuan kepada penulis.



KATA PENGANTAR

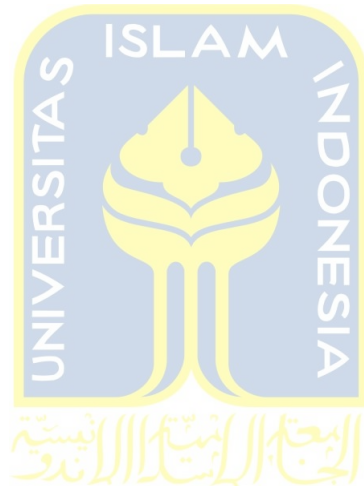


Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga tugas akhir penelitian dengan judul “**Analisis Determinan Realisasi Anggaran di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2016-2020**” dapat diselesaikan. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat kelulusan jenjang S-1 di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Penulis menyampaikan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bimbingan, saran, dan bantuan kepada penulis. Khususnya kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan Hidayah-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga tugas akhir penelitian ini dapat terselesaikan
2. Sang Revolusioner junjungan sejati Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menjadi tokoh panutan penyempurna akhlak manusia.
3. Kedua orang tua penulis hormati dan sayangi I Ketut Mahayana S.Sos dan Silvia S.Sos yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., PhD. Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
5. Bapak Prof. Dr. Jaka Sriyana, SE., M.si. Selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Suharto SE., M.Si. Selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar meluangkan banyak waktu dan memberikan banyak masukan dalam proses penulisan tugas akhir penelitian ini.
7. Sahabat Fausta Gian Darmaputra, Bahrul Ullum, Abdul Malik Ridho, Rakha Fairuzy Hernawan, Khoir Amrulloh, Reynaldi Ananda, Hariz Noer, Attala Chaerunisya, Indah Suci, Salma Mahasin, Danu Firman Ardian, Alvico

Otmar, Raden Rio, Dzaky Kayungyun, Frista Fadila, Haniyyah Azis, Daffaliska Azaria, Abdul Mafatikhul, Axcel Benza, Yusuf Raihan, Muhammad Soyfan, Herawan Aziz, Haryoso, Inggrid Wilsiana, Salsabilla Tiaratama, Dian Tiara, Radjiv Rahman, Alifia Martha, Indra Sakti Adiyaksa, Faiz Alfaeni, Ikrar Aruming, Bagus Nur Faizi, Ikshan Hidayat serta seluruh teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang membantu, memotivasi dan memberi semangat sehingga tugas akhir penelitian ini dapat terselesaikan.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk meningkatkan kualitas penelitian maupun penulisan pada masa yang akan datang.



Yogyakarta, 18 Mei 2022

Penulis

Devandra Ananda Srivintara

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
BAB II.....	13
2.1 Kajian Pustaka	13
2.2 Landasan Teori	23
2.2.2 Pendapat Asli Daerah (PAD)	24
2.2.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	26
2.2.4 Belanja Modal	27
2.2.5 Jumlah Pegawai	28
2.3 Hubungan Antar Variabel.....	29
Hubungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Realisasi Anggaran	29
Hubungan Belanja Modal terhadap Realisasi Anggaran.....	30
Hubungan Jumlah Pegawai terhadap Realisasi Anggaran	31
2.4 Kerangka Pemikiran.....	32
2.5 Hipotesis Penelitian	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	34
3.2 Definisi operasional Variabel.....	34
3.2.2 Variabel Independen.....	34
3.3 Metode Analisis	35
3.3.1 Metode Estimasi Data Panel.....	36
3.3.2 Common Effect Model	36
3.3.3 Fixed Effect Model	37
3.3.4 Random Effect Model.....	37
3.4 Evaluasi Hasil Regresi	38
2. Uji Signifikansi F.....	38
3. Uji Signifikansi Parameter Individu (Uji T).....	38
BAB IV.....	40

4.1	Hasil dan Model Estimasi Data.....	40
4.1.2	Uji Hausman Test.....	41
4.1.3	Hasil Estimasi Fixed Effect Model	42
4.1.4	Uji Koefisien Determinasi (R ²).....	44
4.1.5	Uji F.....	44
4.1.6	Uji T	44
4.2	Interpretasi Hasil.....	45
4.2.2	Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Realisasi Anggaran	45
4.2.3	Analisis Pengaruh Belanja Modal terhadap Realisasi Anggaran.....	47
4.2.4	Analisis Pengaruh Jumlah Pegawai terhadap Realisasi Anggaran	48
4.2.5	Cross Section Effect	48
4.2.6	Period Effect	49
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		50
5.2	Implikasi dan Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA.....		53
LAMPIRAN		56



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Realisasi Anggaran Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016-2020 **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 1.2 Pendapatan Asli Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016-2020 **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 1.3 Indeks Pembangunan Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016-2020 **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 1.4 Belanja Modal di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016-2020

Error! Bookmark not defined.

Tabel 1.5 Jumlah Pegawai di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016-2020 **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu **Error!**

Bookmark not defined. Tabel 4. 1 Hasil Regresi Uji

Chow **Error! Bookmark not defined. Tabel 4. 2**

Period Effect **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4. 3 Hasil Estimasi Fixed Effect Model **Error!**

Bookmark not defined. Tabel 4. 4 Cross Section Effect

Error! Bookmark not defined.

Tabel 4. 5 Period Effect **Error! Bookmark not defined.**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis determinan realisasi anggaran di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2016-2020. Variabel dependen yang digunakan adalah realisasi anggaran dan pendapatan asli daerah, indeks pembangunan manusia, belanja modal dan jumlah pegawai merupakan variabel independen. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah, indeks pembangunan manusia, belanja modal dan jumlah pegawai terhadap realisasi anggaran.

Pemelitian ini menggunakan regresi data panel. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa variabel indeks pembangunan manusia, belanja modal dan jumlah pegawai memiliki pengaruh signifikan terhadap realisasi anggaran, sedangkan pada variabel pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap realisasi anggaran di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Kata kunci: Realisasi Anggaran, Pendapatan Asli Daerah, Indeks Pembangunan Manusia, Belanja Modal, Jumlah Pegawai



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah adalah sebuah bentuk organisasi sektor publik yang menjalankan sistem pemerintahan dalam suatu daerah, dalam menjalankan khususnya pada sektor publik pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan utama yang bertujuan dalam tercapainya kesejahteraan bagi keberlangsungan hidup masyarakatnya. Pemerintah daerah dalam hakikatnya termasuk dalam mengatur dan mengelola anggaran daerah harus menggunakan hasil tersebut untuk meningkatkan dan memprioritaskan peluang yang berpotensi pada pembangunan daerah. Dalam sistem pemerintahan dalam menentukan kebijakan publik, dengan adanya sebuah anggaran yang dalam definisinya adalah alat yang digunakan untuk menekankan tercapainya sebuah target yang telah dirancang dalam bentuk terealisasinya anggaran pada jangka waktu tertentu. Dalam menjalankan kebijakan untuk melayani masyarakat, rencana dana anggaran yang telah disusun pemerintah daerah dapat dilakukan dengan sistem transparansi kepada masyarakat untuk menjadi bahan evaluasi serta perbaikan pada tahun atau periode yang akan datang sehingga terdapat kejelasan dalam hal ini keterbukaan terhadap masyarakat serta pemerintah daerah dapat melakukan kebijakan khususnya sektor public yaitu pengelolaan dana anggaran.

Realisasi anggaran adalah salah satu komponen dalam laporan pemerintah yang memberikan atau menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasinya secara berkala pada suatu periode tertentu. Pelaporan realisasi anggaran bertujuan untuk memberikan informasi tentang anggaran dan realisasinya yang menunjukkan tingkat tercapainya target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada peraturan otonomi daerah, di dalam mengoptimalkan sebuah anggaran daerah yang dulunya hanya berfokus di pemerintahan pusat, kini diubah dan diberikan kemandirian kepada pemerintah daerah untuk mengatur keuangannya sendiri dalam bentuk (APBD) yang merupakan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Menurut (Muindro, 2012) dalam menjalankan perannya, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas disertai dengan

pemberian hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan otonomi daerah dalam sistem kesatuan penyelenggaraan pemerintah negara.

Menurut (Undang-undang nomor 23, 2014), yang dimaksud otonomi adalah hak, kewajiban, serta kewenangan daerah otonom untuk mengatur urusan sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terdapat beberapa tujuan dari otonomi daerah (Indonesia, Undang-undang nomor 32, 2004) tentang Pemerintahan Daerah, yaitu: a) Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan serta kerukunan nasional untuk keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian b) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat, c) Mengembangkan kehidupan demokrasi, d) Mewujudkan keadilan dan pemerataan, e) Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta f) Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah.

Otonomi yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Kabupaten dan Kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang nyata dan penuh tanggung jawab kepada pemerintah daerah secara alami atau proporsional. Terkait dalam hal merealisasikan suatu anggaran, keputusan kebijakan pemerintah daerah sangat penting dan diperlukan dikarenakan kebijakan harus efektif dan efisien untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat daerah itu sendiri. Rancangan keuangan daerah dalam pengalokasian anggaran harus mendapatkan perizinan serta kesepakatan yang mutlak dari badan legislatif daerah, hal ini karena pengalokasian anggaran daerah adalah komponen dari kinerja yang berbentuk realisasi anggaran negara atau daerah yang pada setiap tahunnya dapat berubah hal ini dikarenakan tidak bersifat konstan yaitu dana anggaran yang dialokasikan dapat mengalami perubahan pada tiap tahunnya. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah salah satu provinsi yang ada dalam negara Indonesia. Provinsi ini memiliki status keistimewaan dalam hal ini juga memiliki otonomi khusus. Dalam provinsi ini, Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki lima Kabupaten/Kota yaitu, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Berdasarkan beberapa Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tentunya masing masing pemerintah daerah Kabupaten/Kota memiliki masing-masing dana realisasi anggaran yang dapat memajukan kemakmuran dan kesejahteraan daerah

masing-masing mengingat anggaran memiliki peran penting sebagai alat stabilitas, perencanaan dan pengendalian organisasi atau suatu lembaga dalam penilaian kinerja, distribusi dan alokasi sumber daya publik. Maka dari itu pengelolaan dan tujuan demi tercapainya sasaran yang tepat dana anggaran menjadi salah satu indikator yang harus direalisasikan untuk kesejahteraan publik khususnya masyarakat daerah yang paling utama dalam mencapai kemakmuran pembangunan ekonomi yang lebih baik.

Undang-undang nomor 22, 1999 tentang pemerintahan daerah adalah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di berbagai wilayah daerah di Indonesia (Mardiasmo, 2002). Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa pembangunan daerah kabupaten dan kota diadakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran masyarakat yang bertujuan untuk mencapai pemerataan yang berkeadilan serta memperhatikan potensi keanekaragaman daerah. Dalam acuan oleh undang-undang nomor 22 tahun 1999 ini sangat baik karena arahan ini dapat menciptakan otonomi pemerintahan daerah yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien secara berkala dan berkepanjangan.

Dalam penelitian ini Provinsi DIY sebagai Daerah khusus tentunya memiliki dana khusus atau biasa disebut dana keistimewaan dimana dana keistimewaan DIY adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan istimewa dan merupakan bagian dari dana transfer ke daerah dan dana desa. Untuk melaksanakan kegiatan pembangunan ekonomi diperlukan hadirnya kegiatan ekonomi yang bervariasi dan solutif untuk mendorong daerah kabupaten atau kota untuk terus maju, sinergitas antara masyarakat dan pembuat kebijakan dalam hal ini yaitu pemerintah daerah sangat diperlukan karena tujuan utamanya adalah pembangunan daerah yang berlangsung di setiap daerah benar-benar sesuai dengan prioritas dan potensi daerah. Setiap kabupaten atau kota tentunya juga memiliki kondisi fisik yang berbeda sehingga potensi alam yang tersedia pada masing-masing daerah tidak sama. Perbedaan masing-masing kondisi fisik ini juga akan ikut menentukan dalam rencana pembangunan dan pengembangan daerah. Berikut adalah tabel realisasi anggaran lima Kabupaten atau Kota yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada lima tahun terakhir, yaitu pada tahun 2016-2020.

Tabel 1.1

Tabel Realisasi Anggaran Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016-2020

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
Kulon Progo	1.406,49	1.430,46	1.481,01	1.671,66	1.500,04
Bantul	2.016,54	2.076,74	2.165,65	2.283,59	2.093,72
Gunung Kidul	1.651,55	1.860,23	1.772,31	2.132,22	1.775,06
Sleman	2.455,45	2.489,60	2.580,09	2.770,00	2.532,17
Yogyakarta	1.665,42	1.484,92	1.652,73	1.734,59	1.517,60

Sumber: Data Kemenkeu (diolah)

Pada tabel 1.1 di atas menjelaskan bahwa realisasi anggaran Kabupaten atau Kota yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengalami fluktuasi. Kota Yogyakarta pada tahun 2017 sempat mengalami penurunan realisasi anggaran kemudian setelah tahun tersebut kembali mengalami kenaikan pada tahun 2018 hingga 2019 sebelum pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali, sedangkan Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunung Kidul sempat mengalami penurunan realisasi anggaran pada tahun 2020, kemudian untuk Kabupaten Sleman sendiri selalu mengalami kenaikan realisasi anggaran pada tahun 2016 hingga tahun 2019 sebelum pada akhirnya mengalami penurunan realisasi anggaran pada tahun 2020. Berdasarkan uraian tersebut dapat diartikan bahwa pada tahun 2020 secara keseluruhan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengalami penurunan realisasi anggaran yang mungkin disebabkan oleh adanya faktor penyebaran virus covid-19 yang memberikan dampak perekonomian daerah, perekonomian nasional, bahkan perekonomian global. Selain itu dalam penelitian ini, penulis ingin mengkaji dan menganalisis tentang beberapa faktor lain dan memasukkan variabel lain seperti, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Belanja Modal dan Jumlah Pegawai yang berhubungan dengan Realisasi Anggaran di Kabupaten atau

Kota yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam jangka waktu 5 tahun terakhir yaitu pada tahun 2016 hingga tahun 2020.

PAD adalah Penerimaan Asli Daerah sebagai salah satu penerimaan daerah yang menggambarkan kemandirian tingkat daerah, di mana semakin besar PAD menunjukkan bahwasanya daerah tersebut mampu melakukan desentralisasi dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat yang berkurang. PAD dapat diartikan penerimaan dari berbagai sumber dalam daerah atau wilayahnya sendiri, yang didasarkan undang-undang yang berlaku.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah provinsi yang memiliki potensi besar dalam melakukan fungsi daripada otonomi daerah, PAD sebagai satu dari berbagai pendapatan daerah menjadi indikator pendapatan yang sangat besar dalam proses pembangunan di dalam suatu daerah. Hal ini dapat menjadi pertimbangan yang baik untuk menarik perhatian masyarakat dalam dan luar negeri memiliki satu keunikan yang dimiliki, yaitu kreativitas yang menghadirkan inovasi yang selalu diciptakan di kota ini. Hal tersebut berarti segala sesuatu bisa direalisasikan dan memiliki suatu poin positif yang dapat ditawarkan ke publik.

Tabel 1.2

Pendapatan Asli Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016-2020

Kabupaten/Kota ^a	2016	2017	2018	2019	2020
Kulon Progo	180,27	249,69	211,05	237,88	254,42
Bantul	404,45	494,18	462,65	505,93	479,61
Gunung Kidul	206,28	271,37	226,98	254,81	228,21
Sleman	717,15	825,64	894,27	972,05	788,25
Yogyakarta	540,50	657,05	667,49	689,05	563,17

Sumber: Data Kemenkeu (diolah)

Pada tabel 1.2 menjelaskan bahwa PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menunjukkan peningkatan dan penurunan yang relatif tinggi. Pada tahun 2017 semua Kabupaten dan Kota di Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta (DIY) mengalami kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) yang cukup tinggi dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2016, kemudian pada tahun 2018 terdapat tiga (3) Kabupaten yakni Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul yang secara bersamaan mengalami penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta relatif mengalami kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga pada tahun 2019 semua Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengalami kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kembali secara bersamaan. Dalam lima (5) tahun terakhir hanya Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta yang selalu mengalami kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun ke tahun kecuali pada tahun 2020, hal itu dapat dimungkinkan karena pada tahun tersebut perekonomian nasional dan perekonomian global sedang terdampak akibat dilanda adanya pandemi covid-19 yang berdampak juga bagi pertumbuhan perekonomian daerah sehingga semua Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara bersamaan kembali. Data di atas menunjukkan bahwa kemandirian Kabupaten dan Kota yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki pengaruh dan kontribusi yang besar terhadap alokasi pembangunan perekonomian yang terdapat pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu alat ukur untuk melihat keberhasilan suatu daerah dalam proses pembangunan manusia berdasarkan komponen kualitas hidup. IPM dapat dihitung berdasarkan komponen dasar kualitas hidup yaitu capaian umur panjang, angka melek huruf, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan daya jual penduduk terhadap kebutuhan pokoknya yang dilihat dari besarnya pengeluaran perkapita (Statistik Indonesia 2007).

Tabel 1.3

Indeks Pembangunan Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016-2020

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
Kulon Progo	72,38	73,23	73,76	74,44	74,46
Bantul	78,42	78,67	79,45	80,01	80,01
Gunung Kidul	67,82	68,73	69,24	69,96	69,98
Sleman	82,15	82,85	83,42	83,85	83,84
Yogyakarta	85,32	85,49	86,11	86,65	86,61

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DIY (diolah)

Dari tabel 1.3 di atas menjelaskan bahwa pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan kondisi antara hasil yang telah dihasilkan pada periode waktu sebelumnya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi dari tahun 2019 diraih oleh Kota Yogyakarta dengan nilai 86,65. Kemudian disusul Kabupaten Sleman dengan nilai 83,85 dan Kabupaten Bantul dengan nilai 80,81. Berbanding terbalik dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terendah terdapat di kabupaten Gunung Kidul dengan nilai 69,96 pada tahun yang sama. Perbandingan antara capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Gunung Kidul dari tahun ke tahun masih terlihat kontras. Perbandingan ini menggambarkan adanya ketimpangan yang sangat besar dalam hal pembangunan ekonomi antar wilayah yang ada di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Ke depan perlu adanya upaya-upaya untuk mengatasi ketimpangan ini, salah satu cara yang perlu dilakukan adalah dengan peningkatan realisasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur yang lebih merata dan inovasidari manusianya itu sendiri yang berada di daerah kabupaten Gunung Kidul, terlebih Gunung Kidul terkenal dengan potensi wisatanya. Kegiatan realisasi anggaran yang belum merata di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) harusnya bisa diperluas lagi dan ditujukan untuk pembangunan terhadap berbagai yang memiliki potensi namun masih tertinggal infrastrukturnya.

Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran. Oleh karena itu, belanja modal mempunyai pengaruh penting terhadap realisasi anggaran dalam mengalokasikan dana anggaran yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah seperti dana untuk pembangunan jalan, peralatan, mesin, gedung, irigasi, bangunan dan lain lain.

Tabel 1.4

Belanja Modal di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016-2020

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
Kulon Progo	259,88	258,77	340,49	421,94	323,35
Bantul	284,06	332,62	338,16	336,71	216,40
Gunung Kidul	234,69	396,85	304,84	493,78	254,89
Sleman	344,00	380,63	411,31	451,53	361,07
Yogyakarta	259,59	294,31	325,09	327,43	193,52

Sumber: Data Kemenkeu (diolah)

Selain Pendapatan Asli Daerah (PAD), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Belanja Modal penelitian ini juga memasukkan Jumlah Pegawai sebagai beberapa faktor yang dimungkinkan akan memengaruhi Realisasi Anggaran pada suatu daerah. Pada tabel 1.4 menjelaskan bahwa dalam lima (5) tahun terakhir angka penurunan belanja modal silih berganti terjadi pada tiap Kabupaten dan Kota setiap tahunnya. Pada tahun 2017 dari lima (5) Kabupaten dan Kota yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) hanya Kabupaten Kulon Progo yang mengalami penurunan belanja modal, sedangkan pada tahun 2018 penurunan angka belanja modal dialami oleh Kabupaten Gunung Kidul dan pada tahun 2019 Kabupaten Bantul yang menjadi satu-satunya yang mengalami penurunan belanja modal. Dari data di atas hanya Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta yang selalu mengalami peningkatan angka belanja modal sebelum pada tahun 2020 di

mana semua Kabupaten/Kota yang terdapat pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) secara bersamaan mengalami penurunan angka belanja modal.

Menurut (Hasibuan, 2007) pegawai adalah seseorang yang bekerja dengan menggunakan tenaganya yang berjasas untuk perusahaan dan memperoleh balas jasa atas apa yang telah dikerjakan berupa upah atau gaji yang sesuai yang sesuai dengan perjanjian yang dilakukan di awal. Pegawai adalah orang-orang yang bekerja dalam suatu badan tertentu seperti lembaga-lembaga pemerintah maupun badan usaha. Dalam suatu anggaran terdapat beberapa jumlah pegawai yang akan mendapatkan gaji atau upah yang bersumber dari jumlah anggaran yang akan direalisasikan pemerintah dalam bentuk upah.

Tabel 1.5
Jumlah Pegawai di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016-2020

Kabupaten / Kota	2016	2017	2018	2019	2020
Kulonprogo	7085	6503	6203	6245	5840
Bantul	9193	8445	8009	8004	7371
Gunungkidul	9880	8714	8410	8397	8104
Sleman	10164	9266	8833	8906	8288
Yogyakarta	6080	5475	5226	5223	4876

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi D.I.Yogyakarta (diolah)

Tabel 1.5 menjelaskan pada penelitian ini memasukkan faktor terakhir yang dimungkinkan memengaruhi realisasi anggaran. Dalam tabel di atas dijelaskan dalam data (5) lima tahun terakhir jumlah pegawai kabupaten dan kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara keseluruhan jumlah pegawai di kota Yogyakarta adalah yang paling sedikit dari tahun ke tahun (2016-2020) sedangkan jumlah pegawai tertinggi ada pada kabupaten Sleman setiap tahunnya.

Penelitian ini dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) karena ingin mengetahui bagaimana keempat (4) komponen atau faktor di atas memengaruhi

realisasi anggaran di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), terlebih Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah salah satu daerah yang memiliki tingkat pendidikan yang baik dan memiliki fasilitas yang baik dalam segala bidang. Maka dari itu keempat faktor atau komponen tersebut dijadikan variabel dalam penelitian untuk melihat bagaimana Realisasi Anggaran di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan uraian di atas, peneliti bermaksud untuk mengkaji tentang “**Analisis Determinan Realisasi Anggaran di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2016-2020**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Realisasi Anggaran di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
2. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Realisasi Anggaran di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
3. Bagaimana pengaruh Belanja Modal terhadap Realisasi Anggaran di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
4. Bagaimana pengaruh Jumlah Pegawai terhadap Realisasi Anggaran di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Realisasi Anggaran di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
2. Menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Realisasi Anggaran di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
3. Menganalisis pengaruh Belanja Modal terhadap Realisasi Anggaran di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
4. Menganalisis pengaruh Jumlah Pegawai terhadap Realisasi Anggaran di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak di antaranya :

1. Penulis
Bagi penulis dapat menerapkan ilmu ekonomi yang sudah dipelajari selama masa kuliah serta syarat untuk meraih gelar dan kelulusan jenjang S1 di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
2. Penelitian selanjutnya
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk pengembangan bagi penelitian selanjutnya khususnya faktor-faktor yang memengaruhi Realisasi Anggaran di suatu wilayah.
3. Pemerintah
Bagi pemerintah khususnya pemerintah daerah, penelitian ini dapat dijadikan acuan dan pengembangan kebijakan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi Realisasi Anggaran di suatu wilayah demi tercapainya keberhasilan otonomi daerah.
4. Pihak lain
Bagi pihak lain terutama masyarakat, penelitian ini juga bertujuan untuk dapat memberikan informasi yang dapat dikaji dan diteliti kembali tentang kinerja

pemerintah daerah dalam mengelola realisasi anggaran sebagai bentuk transparansi dan keefektifan merealisasikan anggaran oleh pemerintah daerah setempat.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Dalam penulisan skripsi ini peneliti mencari informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan mengenai kekurangan dan kelebihan yang sudah ada dalam rangka acuan pertimbangan bagi penulis dalam proses pengerjaan tugas akhir skripsi. Terdapat beberapa referensi yang pernah dilakukan peneliti sebelumnya, antara lain :

Rusdi (2018) melakukan penelitian yang berjudul- Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kab. Enrekang. Dalam penelitian ini menggunakan data deskriptif kuantitatif, sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam oleh peneliti adalah penelitian lapangan, interview, dan observasi. Hasil penelitian bahwa mengenai analisis dana anggaran pendapatan dan belanja daerah, mengindikasikan bahwa kinerja pendapatan belum mencapai hasil yang diharapkan namun termasuk dalam kategori efektif hal ini dapat ditinjau dari lebih rendahnya jumlah yang terealisasi dengan yang dianggarkan, sedangkan sistem belanja pemerintah daerah Kab. Enrekang dinilai baik karena dapat menghemat anggaran belanja dengan sangat efisien. Hal ini ditinjau dari nihilnya angka realisasi yang melebihi anggaran belanja yang diharapkan. Terdapat persamaan pada salah satu variabel yang diuji sedangkan terdapat perbedaan dalam penelitian ini adalah terletak pada wilayah yang diuji.

Daling (2013) melakukan penelitian yang berjudul- Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah di Kabupaten Minahasa Tenggara. Dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif di mana metode penelitiannya menggunakan penelitian lapangan. Hasil penelitian bahwa dapat disimpulkan fungsi pendapatan terbilang baik hal ini dibuktikan dari lebih rendahnya angka yang terealisasi dengan angka yang dianggarkan yaitu dengan rata sebesar 97,71% sedangkan untuk fungsi belanja memberikan dampak positif karena dapat dibuktikan juga dari rendahnya anggaran belanja yang terealisasi dari yang telah dianggarkan sehingga pemerintah kabupaten Minahasa Tenggara melakukan penghematan yang menghasilkan adanya

surplus anggaran. Terdapat persamaan pada salah satu variabel yang diuji dalam penelitian ini sedangkan terdapat perbedaan dari penelitian adalah terletak pada wilayah yang diuji.

Astria Nur Jannah Dien (2015) melakukan penelitian yang berjudul- Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung. dalam ini penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yang berupa studi kasus dan studi pustaka. Hasil penelitian dapat disimpulkan tingkat dan kriteria yang solutif dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Dinas Pendapatan Kota Bitung Tahun Anggaran 2009 hingga 2013 sangat berfungsi dengan baik akan tetapi tingkat kriteria efisien anggaran dan belanja secara keseluruhan tidak solutif karena penggunaan dana belanja yang lebih besar. Terdapat persamaan dari penelitian adalah terletak pada salah satu variabel sedangkan terdapat perbedaan pada penelitian ini yaitu wilayah atau daerah yang diuji.

Andre P. Tulangow (2016) melakukan penelitian yang berjudul- Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa. Dalam kasus ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian bahwa dalam tiga (3) tahun penelitian pemerintah kabupaten Minahasa belum terlalu baik dalam merealisasikan pendapatan daerahnya. Berbeda dengan Belanja Daerah, dalam tiga (3) tahun penelitian pemerintah Kabupaten Minahasa sudah baik dalam merealisasikan belanja dengan tidak melebihi jumlah yang dianggarkan. Terdapat Persamaan dalam penelitian ini yaitu pada beberapa variabel yang diuji sedangkan terdapat perbedaan dari penelitian adalah terletak pada wilayah yang diuji.

Rukayah (2017) melakukan penelitian berjudul- Analisis Laporan Realisasi Anggaran Dengan Menggunakan Rasio Efektif dan Rasio Efisien Pada Kantor Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian bahwa Efektif badan perizinan terpadu dan penanaman modal kabupaten Serang tahun anggaran 2014 hingga 2016 dilihat dari rata-rata rasio efektifnya diperoleh sebesar 102% termasuk dalam kriteria yang efektif dan pada rasio efisiennya diperoleh sebesar 92% termasuk dalam kriteria kurang efektif. Terdapat persamaan dari penelitian adalah terletak pada

beberapa variabel yang diuji sedangkan terdapat perbedaannya adalah pada tahun yang diuji.

Ani (2020) dalam penelitian yang berjudul Analisis Determinasi Penyerapan Anggaran di Kota Depok menemukan bahwa SDM manusia yang baik dan berkompeten berpengaruh signifikan terhadap penyerapan realisasi anggaran Pemerintah Kota Depok. Penelitian ini menegaskan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan realisasi anggaran. Dalam penelitiannya menyatakan bahwa administrasi dapat memengaruhi penyerapan suatu realisasi anggaran dalam segala bentuk yang telah disusun. Jika terdapat permasalahan administrasi dalam pengorganisasian, meskipun kualitas sumber daya manusia atau SDM nya sudah sangat baik hal ini akan berpengaruh terhadap penyerapan realisasi anggaran, hal itu dikarenakan pekerjaan pegawai pada pemerintahan daerah akan terhambat. Pengaruh positif ini menunjukkan bahwa semakin baik kualitas sumber daya manusia yang dimiliki organisasi maka akan semakin baik pula dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang berarti kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap penyerapan realisasi anggaran (APBD).

Karim (2011) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Realisasi Anggaran Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal terhadap Realisasi Anggaran menegaskan bahwa strategi perencanaan penganggaran belanja dalam penetapan realisasi anggaran harus dilakukan dengan melihat realisasi anggaran tahun sebelumnya. Dalam penelitiannya membuktikan bahwa realisasi anggaran belanja mencakup realisasi anggaran belanja barang, belanja pegawai dan belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap perencanaan dalam realisasi anggaran. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat tercapainya berbagai target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini berarti bahwa realisasi anggaran dapat diukur dalam kinerja satuan kerja seperti yang telah disyaratkan dalam sistem pengelolaan keuangan berbasis kinerja.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

Judul dan Penulis (Tahun)	Hasil	Persamaan	Perbedaan
Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kab. Enrekang. (Rusdi, 2018)	Hasil penelitian: Hasil penelitian bahwa mengenai analisis dana anggaran pendapatan dan belanja daerah, mengindikasikan bahwa kinerja pendapatan belum mencapai hasil yang diharapkan namun termasuk dalam kategori efektif hal ini dapat ditinjau dari lebih rendahnya jumlah yang terealisasi dengan yang dianggarkan, sedangkan sistem belanja	Persamaan pada penelitian ini terdapat persamaan pada salah satu variabel yang diuji.	Perbedaan dari penelitian ini adalah terletak pada wilayah yang diuji, yaitu pemerintah daerah Kabupaten Enrekang.

	<p>pemerintah daerah Kab. Enrekang dinilai baik karena dapat menghemat anggaran belanja dengan sangat efisien. Hal ini ditinjau dari nihilnya angka realisasi yang melebihi anggaran belanja yang diharapkan.</p>		
<p>Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah di Kabupaten Minahasa Tenggara. (Daling, 2013)</p>	<p>Hasil penelitian: Hasil penelitian bahwa dapat disimpulkan fungsi pendapatan terbilang baik hal ini dibuktikan dari lebih rendahnya angka yang terealisasi dengan angka yang dianggarkan</p>	<p>Persamaan pada penelitian ini terdapat persamaan pada salah satu variabel yang diuji.</p>	<p>Perbedaan dari penelitian adalah terletak pada wilayah yang diuji, yaitu pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.</p>

	<p>yaitu dengan rata sebesar 97,71% sedangkan untuk fungsi belanja memberikan dampak positif karena dapat dibuktikan juga dari rendahnya anggaran belanja yang terealisasi dari yang telah dianggarkan sehingga pemerintah kabupaten Minahasa Tenggara melakukan penghematan yang menghasilkan adanya surplus anggaran.</p>		
<p>Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja</p>	<p>Hasil penelitian: Hasil penelitian dapat disimpulkan tingkat dan</p>	<p>Persamaan pada penelitian ini terdapat persamaan pada salah satu</p>	<p>Perbedaan dari penelitian adalah terletak pada wilayah yang diuji, yaitu</p>

<p>Keuangan Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung. ((Astria Nur Jannah Dien, 2015)</p>	<p>kriteria yang solutif dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Dinas Pendapatan Kota Bitung Tahun Anggaran 2009 hingga 2013 sangat berfungsi dengan baik akan tetapi tingkat kriteria efisien anggaran dan belanja secara keseluruhan tidak solutif karena penggunaan dana belanja yang lebih besar.</p>	<p>variabel yang diuji.</p>	<p>pemerintah daerah Kota Bitung.</p>
<p>Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten</p>	<p>Hasil penelitian: Dalam tiga (3) tahun penelitian pemerintah kabupaten Minahasa belum terlalu baik</p>	<p>Persamaan pada penelitian ini terdapat persamaan pada salah satu</p>	<p>Perbedaan dari penelitian adalah terletak pada wilayah yang diuji, yaitu pemerintah</p>

<p>Minahasa. (Andre P. Tulangow, 2016)</p>	<p>dalam merealisasikan pendapatan daerahnya. Berbeda dengan Belanja Daerah, dalam tiga (3) tahun penelitian pemerintah Kabupaten Minahasa sudah baik dalam merealisasikan belanja dengan tidak melebihi jumlah yang dianggarkan.</p>	<p>variabel yang diuji.</p>	<p>Kabupaten Minahasa.</p>
<p>Analisis Laporan Realisasi Anggaran Dengan Menggunakan Rasio Efektif dan Rasio Efisien Pada Kantor Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal</p>	<p>Hasil penelitian: Efektif badan perizinan terpadu dan penanaman modal kabupaten Serang tahun anggaran 2014 hingga 2016 dilihat dari rata-rata rasio efektifnya diperoleh</p>	<p>Persamaan pada penelitian ini terdapat persamaan pada beberapa variabel yang diuji.</p>	<p>Perbedaan dari penelitian adalah terletak pada tempat dan tahun diuji, yaitu pemerintah Kabupaten Serang, pada tahun 2017.</p>

<p>Kabupaten Serang. (Rukayah, 2017)</p>	<p>sebesar 102% termasuk dalam kriteria yang efektif dan pada rasio efisiennya diperoleh sebesar 92% termasuk dalam kriteria kurang efektif.</p>		
<p>Analisis Determinasi Penyerapan Anggaran di Kota Depok (Ani, 2020)</p>	<p>Hasil Penelitian ini menegaskan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan realisasi anggaran.</p>	<p>Persamaan pada penelitian ini terdapat persamaan pada salah satu variabel yang diuji.</p>	<p>Perbedaan dari penelitian adalah terletak pada tempat dan tahun diuji, yaitu di Kota Depok pada tahun 2020.</p>
<p>Pengaruh Realisasi Anggaran Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal terhadap</p>	<p>Hasil ini membuktikan bahwa realisasi anggaran belanja mencakup realisasi anggaran belanja</p>	<p>Persamaan pada penelitian ini terdapat beberapa persamaan pada salah satu</p>	<p>Perbedaan dari penelitian adalah terletak pada tempat dan tahun diuji, yaitu tahun 2011.</p>

<p>Realisasi Anggaran (Karim, 2011)</p>	<p>barang, belanja pegawai dan belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap perencanaan dalam realisasi anggaran.</p>	<p>variabel yang diuji.</p>	
---	--	-----------------------------	--



2.2 Landasan Teori

2.2.1 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran adalah salah satu komponen dalam laporan pemerintah yang memberikan atau menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasinya secara berkala pada suatu periode tertentu. (Kumorotomo, 2005), anggaran adalah suatu ide atau rencana yang disusun secara terstruktur dan sistematis yang meliputi seluruh kegiatan lembaga yang dinyatakan dalam unit atau kesatuan moneter dan berlaku dalam jangka waktu dan periode tertentu yang akan datang. Suatu budget dalam hal ini anggaran ditujukan sebagai tolak ukur mengenai hasil kinerja yang hendak dicapai selama periode jangka waktu tertentu yang dinyatakan dalam bentuk kemampuan keuangan atau finansial. Anggaran publik yang dihasilkan pajak dari masyarakat yang kewenangannya di bawah otoritas pemerintah dinyatakan oleh Hariadi, Bawono dan Restianto, bahwa anggaran publik adalah rencana kegiatan yang dibuat dalam bentuk rencana bagi pendapatan dan belanja dalam satuan moneter, anggaran yang dimaksud yang tercermin dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Penetapan anggaran adalah suatu proses kebijakan publik, hal ini dikarenakan berhubungan dengan konsen pemerintah dalam suatu wilayah atau daerah untuk menetapkan program dan kegiatan yang berhubungan dengan hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan sesuai dengan kepentingan publik. Menurut (Wibawa, 2011) secara epistemologi, kebijakan terdiri dari dua kata yakni **kebijakan** dan **publik**. Robert Eyestone membuat definisi kebijakan dalam artian yang luas bahwa kebijakan adalah hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya di mana unit pemerintah yang dimaksud adalah pemerintah setempat sebagai pelaku kebijakan harus peka dan tanggap dalam merespon permasalahan di sekitarnya yang tentunya merupakan permasalahan publik.

Perencanaan dalam menyiapkan anggaran memiliki arti yang penting, hal itu karena jelas mengungkapkan apa yang akan dilakukan dalam masa yang akan datang. Menurut (Bastian, 2006) dengan terealisasinya anggaran adalah sebuah bentuk laporan yang bertujuan untuk mengetahui selisih antara jumlah yang digambarkan dalam

anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada awal periode dengan jumlah yang direalisasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada akhir periode.

Adapun tujuan dan manfaat dalam mengoptimalkan sebuah anggaran ini yaitu agar dapat meningkatkan kinerja pemerintah pada suatu daerah demi mempertimbangkan dan mengeluarkan kebijakan fiskal yang dapat menciptakan efisien dan keadilan serta meningkatkan koordinasi pada sistem pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan terhadap masyarakat dengan melalui proses yang diprioritaskan dan dimungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi standar kebutuhan dalam bentuk memajukan segala bidang dan mensejahterakan masyarakat tersebut. Kemudian dalam perencanaannya terealisasinya sebuah anggaran dapat berguna bagi pemerintah dan pengguna lainnya dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi anggaran dengan sistem yang akuntabilitas dan tertatanya sebuah pelaporan terhadap anggaran yang juga berguna untuk memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintahan dalam periode yang akan datang.

2.2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber-sumber dari hasil penerimaan daerah yang digunakan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan berbagai usaha yang ada di suatu daerah untuk meminimalkan ketergantungan dan dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri adalah hal yang sangat penting bagi pemerintah daerah karena menunjukkan kemampuan daerah dalam menggali berbagai sumber keuntungannya sendiri yang kemudian dapat menjadi sebuah ukuran kinerja bagi pemerintah daerah dalam tahap berproses untuk pengembangan ekonomi dalam suatu daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan keseluruhan penerimaan daerah yang dihasilkan dari berbagai sumber ekonomi asli daerah itu sendiri.

Menurut Nuarisa (2013) dalam hal untuk mengalokasikan belanja modal, pemerintah diharuskan mempertimbangkan pendapatan asli daerah (PAD) yang diterima untuk benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Tinggi dan rendahnya belanja modal akan ditentukan dengan tinggi dan rendahnya pendapatan

asli daerah (PAD) sehingga apabila pemerintah daerah ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik pemerintah daerah tersebut harus berusaha optimal untuk menggali pendapatan asli daerah (PAD) itu sendiri sebesar-besarnya.

Menurut Darwanis (2014) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diserap daerah dari berbagai sumber dalam wilayah daerahnya itu sendiri yang penerimaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran yang penting karena melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dinilai sejauh mana pemerintah daerah dapat membiayai kinerja pemerintahan serta kemajuan daerahnya.

Kemudian menurut Widhiari (2015) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan jumlah pendapatan daerah yang didapatkan dari pungutan dari beberapa objek potensial dalam wilayah itu tersebut yang terikat aturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan untuk memberi kuasa kepada pemerintah daerah dalam hal mengoptimalkan capaian dan potensi pendanaan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.

Dalam Pasal 1 ayat 18 (Indonesia, Undang-undang nomor 33, 2004) menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah melalui berbagai pemungutan berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan undang-undang nomor 33 tahun 2004, apabila kebutuhan pembiayaan dalam suatu daerah lebih tinggi diperoleh dari bantuan atau subsidi dari pemerintah pusat dan nyatanya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kebutuhan pembiayaan sangat rendah, maka dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan daerah tersebut masih sangat lemah dan jauh dari harapan. Rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan bukti ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya perekonomiannya terutama berbagai sumber pendapatan daerah itu tersebut.

2.2.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM), adalah indeks untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak (Statistik Indonesia 2015).

Untuk melihat sejauh mana keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan manusia yaitu dengan mengetahui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 1990, *United Nation Development Program (UNDP)* memperkenalkan “*Human Development Index (HDI)*” atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat menggambarkan hasil pelaksanaan pembangunan manusia menurut tiga komponen indikator kemampuan yang mendasar yaitu, kesehatan, kualitas pendidikan, serta akses terhadap sumber daya ekonomi berupa pemerataan daya beli masyarakat (Kuncoro, 2015). Indikator kesehatan diukur dengan tingkat harapan hidup atau usia yang panjang, indikator pendidikan diukur dengan angka harapan sekolah (melek huruf) dan rata lama sekolah, kemudian standar kehidupan diukur dengan pendapatan riil yang disesuaikan, yaitu kemampuan daya beli (Statistik Indonesia 2015).

Lembaga *UNDP (United Nations Development Program)* telah mempublikasikan laporan pembangunan yang disebut HDI (*Human Development Index*) dalam bentuk kuantitatif. HDI merupakan tolak ukur yang dirumuskan secara konstan dalam pembangunan (SDM) sumber daya manusia.

Terdapat tiga Indikator yang digunakan untuk mengukur HDI, yaitu (UNDP, *Human Development Report*, 1993).

a) Indeks Harapan Hidup

Pengukuran dengan indikator penghitungan harapan hidup saat lahir (*life expectancy of birth*) dan angka kematian bayi per seribu penduduk (*infant mortality rate*).

b) Indeks Pendidikan

Pengukuran dengan dua indikator, yaitu dengan angka melek huruf pada usia 15 tahun ke atas (adult literacy rate) dan angka banyaknya penduduk tahun rata-rata usia 25 tahun ke atas yang masih bersekolah (*the mean years of schooling*).

c) Indeks Standar Hidup Layak

Pengukuran dengan menggunakan angka pengeluaran riil perkapita.

Menurut Todaro (2003) Indeks yang dirancang UNDP memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman mengenai berbagai komponen penyusun pembangunan (dicerminkan oleh peningkatan HDI sepanjang waktu) dan perbandingan kelompok dan kawasan di dalam suatu negara. Dengan menggabungkan dan mengkombinasikan data sosial dan ekonomi, HDI membuat banyak negara menerapkan ukuran yang lebih luas dalam kinerja pembangunannya, dan untuk memfokuskan kebijakan ekonomi dan sosialnya secara lebih langsung ke dalam berbagai bidang yang membutuhkan perbaikan.

2.2.4 Belanja Modal

Sebuah pengeluaran rutin dalam hal yang dibuat pemerintah di suatu daerah yang bertujuan terbentuknya modal yang tersedia merupakan salah satu definisi dari Belanja Modal. Dalam hal ini belanja modal yang dimaksudkan adalah pembelanjaan berupa peralatan, mesin, tanah dan bangunan kemudian jaringan dan beberapa bentuk fisik lainnya.

Menurut Halim (2007) belanja modal didefinisikan sebagai pengeluaran anggaran untuk perolehan aset yang bersifat tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat dalam kurun satu periode akuntansi. Definisi tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010, di mana Belanja Modal adalah pengeluaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Satu periode akuntansi yang dimaksud disini adalah dua belas (12) bulan waktu yang digunakan untuk berbagai kegiatan yang dilakukan pemerintah pada suatu daerah.

Menurut Permendagri Nomor 13 tahun (2006), Belanja Modal difungsikan untuk fungsi pengeluaran yang digunakan dengan optimal dalam rangka pengadaan

atau pembelian pembangunan aset yang bersifat tetap dalam kegiatan pemerintahan seperti dalam bentuk peralatan, tanah, mesin, gedung, bangunan, jalan dan aset tetap lainnya.

Teori lain yang memperkuat definisi tersebut seperti menurut Mursyidi (2009) menyebutkan bahwa Belanja Modal merupakan pengeluaran dalam suatu anggaran dengan tujuan memperoleh aset tetap dan aset lainnya dalam kurun waktu satu periodeakuntansi atau dua belas (12) ke depan. Peraturan perundang-undangan No 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah menyebutkan bahwa belanja modal sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat 1 huruf b, pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan dampak yang bermanfaat lebih dari jangka satu periode akuntansi tersebut.

Beberapa teori di atas dapat dipertegas dan disimpulkan bahwa belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk berbagai perolehan aset lainnya yang dikeluarkan oleh suatu pemerintahan daerah dengan harapan memberikan manfaat bagi daerah itu sendiri dalam jangka waktu dua belas (12) ke depan. Dalam hal ini belanja modal memiliki hubungan dalam keterkaitan dengan perencanaan keuangan jangka panjang dalam pembiayaan bagi pemeliharaan aset tetap yang menghasilkan belanja modal.

2.2.5 Jumlah Pegawai

Menurut Suharno (2008) pegawai merupakan seorang yang ditugaskan untuk bekerja di sebuah perusahaan atau lembaga pemerintah yang bertugas melakukan operasional perusahaan dan seseorang itu digaji yang berperan sebagai penggerak pada perusahaan atau lembaga pemerintah.

Menurut Musanef (1984) bahwasanya pegawai merupakan pekerja yang secara langsung digerakkan oleh atasan yang menyelenggarakan pekerjaannya sehingga menghasilkan sebuah karya yang diharapkan dari atasan untuk pencapaian suatu lembaga atau perusahaan yang telah ditetapkan.

2.3 Hubungan Antar Variabel

Hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Realisasi Anggaran

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan jumlah keseluruhan yang diperoleh dari potensi pendapatan yang ada di suatu wilayah atau daerah yang berdasarkan peraturan dan kebijakan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang penting bagi suatu daerah yang dihasilkan dari berbagai sumber potensial yang ada di suatu daerah dalam memenuhi kebutuhannya serta memiliki peran yang signifikan untuk mengetahui kemampuan daerah untuk melakukan kegiatan pemerintah dalam menjalankan pembangunan daerah. Dalam melakukan sistem otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diharapkan memiliki kemandirian yang lebih besar dalam mengelola suatu anggaran daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan secara keseluruhan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah seperti, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan sumber-sumber lain dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Kontribusi yang besar dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat diharapkan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat daerah, maka dapat dikatakan peningkatan kinerja pemerintah dalam mengelola anggaran dan realisasinya. Jika Pendapatan Asli Daerah naik maka kinerja pengelolaan pemerintah daerah dalam hal realisasi anggaran juga akan meningkat dan efisien.

Hubungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Realisasi Anggaran

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan alat ukur untuk mengetahui seberapa besar dampak yang didapatkan dalam proses peningkatan kemampuan dasar sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki pada suatu daerah. Pembangunan sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu komponen kegiatan pembangunan melalui pemberdayaan penduduk yang bertujuan pada peningkatan dasar manusia.

Dalam hal pembangunan manusia, investasi alokasi anggaran adalah hal mutlak yang dibutuhkan pemerintah untuk membangun sarana dan sistem pembangunan manusia yang baik. Alokasi realisasi anggaran pemerintah sangat berpengaruh bagi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Realisasi Anggaran pada sektor

pembangunan manusia dapat dialokasikan untuk pelayanan dan penyediaan infrastruktur seperti pendidikan, kesehatan dan indikator lain yang dilakukan secara merata dan berkeadilan untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM). Semakin tinggi tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang didukung dengan realisasi anggaran pemerintah dalam menginvestasikan sarana dan prasarana untuk kepentingan pembangunan manusia, maka semakin mudah bagi setiap individu dalam melakukan produktivitas yang akhirnya meningkatkan standar ekonomi dan pembangunan pada suatu daerah. Jika IPM pada suatu daerah baik, maka realisasi anggaran yang dikeluarkan pemerintah semakin besar.

Hubungan Belanja Modal terhadap Realisasi Anggaran

Berkembangnya pembangunan dan penambahan aset diharapkan akan terjadinya peningkatan kemandirian pemerintah daerah dalam membiayai kegiatannya dalam hal merealisasikan anggaran serta meningkatkan modal bagi pemerintah daerah yang berdampak pada semakin meningkatnya efisiensi pengelolaan anggaran pemerintah daerah itu sendiri.

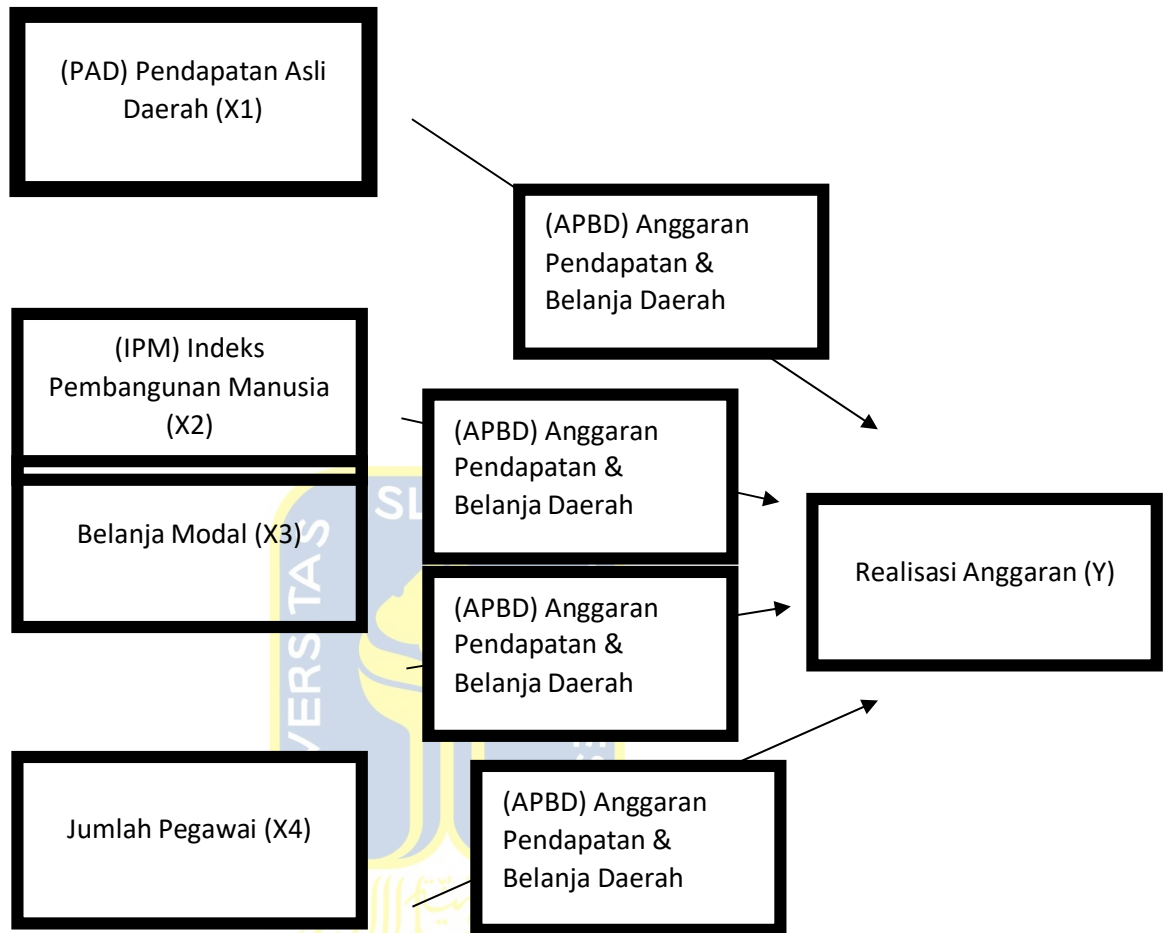
Belanja Modal yang diinvestasikan pemerintah daerah merupakan alokasi anggaran daerah dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat dengan tujuan yang bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Pemerintah akan melakukan pembangunan yang mendukung sarana dan prasarana serta infrastruktur yang diperlukan oleh daerah yang tercermin dalam Belanja Modal, besarnya Belanja Modal yang dilakukan oleh pemerintah merupakan cerminan banyaknya sarana dan infrastruktur yang dibangun. Hal ini diharapkan agar semakin banyak pembangunan yang dilakukan akan meningkatkan target yang efisien dalam melakukan realisasi anggaran sesuai dengan yang ingin dipahami, dicapai dan diharapkan, semakin banyak sumber yang direalisasikan maka hasilnya pun akan semakin besar akan tetapi dalam teorinya belanja modal dalam pelaksanaannya lebih sulit dibandingkan dengan belanja rutin atau belanja pegawai kemudian secara aktual seringkali di daerah-daerah itu ditemukan pelaksanaan infrastruktur itu biasanya terjadi pada akhir tahun.

Hubungan Jumlah Pegawai terhadap Realisasi Anggaran

Pegawai adalah orang-orang yang bekerja dalam suatu badan tertentu seperti lembaga-lembaga pemerintah maupun badan usaha. Dalam suatu anggaran terdapat beberapa jumlah pegawai yang akan mendapatkan gaji atau upah yang bersumber dari jumlah anggaran yang akan direalisasikan pemerintah dalam bentuk upah. Apabila jumlah pegawai mengalami kenaikan maka realisasi anggaran yang diberikan kepada pemerintah daerah akan semakin besar untuk menggaji pegawai oleh karena itu dalam suatu pengelolaan anggaran dalam suatu pemerintah daerah, lembaga pemerintahan dapat mempertimbangkan alokasi anggaran dalam terealisasinya suatu anggaran.



2.4 Kerangka Pemikiran



X1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X2 : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

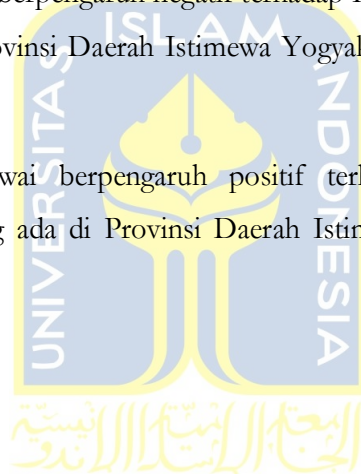
X3 : Belanja Modal (BM)

X4 : Jumlah Pegawai (JP)

2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian terdahulu maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Diduga Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Realisasi Anggaran di kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode tahun 2016-2020.
2. Diduga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif terhadap Realisasi Anggaran di kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode tahun 2016-2020.
3. Diduga Belanja Modal berpengaruh negatif terhadap Realisasi Anggaran di kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode tahun 2016-2020.
4. Diduga Jumlah Pegawai berpengaruh positif terhadap Realisasi Anggaran di kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode tahun 2016-2020.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini mencakup lima (5) wilayah kabupaten dan kota dalam jangka lima (5) tahun dimulai dari 2016-2020. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapatkan dari data Kemenkeu dan Badan Pusat Statistik (BPS) pada regional Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.2 Definisi operasional Variabel

3.2.1 Variabel Dependen

Realisasi Anggaran adalah salah satu komponen dalam laporan pemerintah yang memberikan atau menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasinya secara berkala pada suatu periode tertentu. Dalam penelitian ini Realisasi Anggaran dinyatakan sebagai (Y). Data dari Realisasi Anggaran diperoleh dari data Kemenkeu Daerah Istimewa Yogyakarta dalam jangka waktu dari tahun 2016-2020.

3.2.2 Variabel Independen

1. Pendapatan Asli Daerah (X1)

Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu kondisi di mana adanya kenaikan harga barang secara terus-menerus dalam periode waktu tertentu. Dalam penelitian ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinyatakan sebagai X1. Data dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperoleh dari data Kemenkeu Daerah Istimewa Yogyakarta dalam jangka waktu 2016-2020. Satuan pendapatan asli daerah (PAD) yaitu miliar.

2. Indeks Pembangunan Manusia (X2)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indeks untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Dalam penelitian ini Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dinyatakan sebagai X2. Data dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS)

Daerah Istimewa Yogyakarta dalam jangka waktu 2016-2020. Satuan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu persen.

3. Belanja Modal (X3)

Belanja Modal adalah suatu pengeluaran yang dapat disebutkan sebagai pengeluaran rutin dalam rangka pembentukan modal yang ada. Dalam penelitian ini Belanja Modal dinyatakan sebagai X3. Data dari Belanja Modal diperoleh dari Data Kemenkeu Daerah Istimewa Yogyakarta dalam jangka waktu 2016-2020. Satuan belanja modal yaitu miliar.

4. Jumlah Pegawai (X4)

Jumlah Pegawai merupakan pegawai yang bekerja di instansi pemerintahan daerah maupun pusat (PNS). Dalam penelitian ini jumlah pegawai dinyatakan sebagai X4. Data dari jumlah pegawai diperoleh dari Data Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta dalam jangka waktu 2016-2020. Satuan jumlah pegawai yaitu jiwa.

3.3 Metode Analisis

Dalam penelitian ini data yang akan digunakan adalah data panel. Menurut Basuki dan Prawoto (2017) data panel adalah penyatuan antara data *time series* atau runtun waktu dan *cross section* atau data silang. Data *time series* adalah data yang terdiri dari satu atau lebih beberapa variabel yang akan dikaji pada satu unit observasi dalam jangka waktu tertentu, sedangkan data *cross section* adalah data observasi dari beberapa indikator dalam satu periode waktu tertentu. Dalam tercapainya tujuan dalam sebuah penelitian, penulis menggunakan model analisis data panel dengan pendekatan *fixed effect* dan *random effect*.

3.3.1 Metode Estimasi Data Panel

Regresi dilakukan dengan metode analisis regresi panel dengan menggunakan persamaan model :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e_{it}$$

Keterangan :

Y = Realisasi Anggaran (RA)

X1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X2 = Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

X3 = Belanja Modal (BM)

X4 = Jumlah Pegawai (JP)

i = 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

t = waktu dari tahun 2016 sampai 2020

e = error

3.3.2 Common Effect Model

Dalam regresi data panel, common effect model hanya terdapat dari beberapa kombinasi data *time series* dan *cross section* sehingga dapat dikatakan sebagai model yang sangat sederhana. Hubungan antara waktu dan individu tidak diperhatikan sehingga dapat diasumsikan bahwa berbagai kurun waktu dapat diartikan bahwa tersebut adalah sama. Maka pendekatan yang digunakan yaitu *Ordinary Least Square* (OLS) untuk estimasi data panel. Berikut adalah persamaannya :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + u_{it}$$

3.3.3 Fixed Effect Model

Terdapat perbedaan antar individu yang intersepnya dapat diakomodasikan dalam model ini. Untuk estimasi jenis data ini dapat menggunakan teknik variabel dummy, biasanya teknik ini digunakan untuk melihat perbedaan intersep antar perusahaan. Model estimasi ini disebut dengan *Least Squares Dummy Variable* (LSDV). Berikut adalah persamaannya :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + u_{it}$$

3.3.4 Random Effect Model

Pada model ini, perbedaan intersep dapat diakomodasikan menggunakan error terms tiap perusahaan. Model ini sangat menguntungkan karena dapat menghilangkan heteroskedastisitas. Estimasi data panel ini mengasumsikan di mana gangguan variabel mungkin saling berhubungan antara waktu dan individu. Berikut adalah persamaannya :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + u_{it}$$

Terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan untuk mendapatkan model yang paling tepat dalam mengelola data panel. Pengujian yang dapat dilakukan beberapa adanya adalah sebagai berikut:

1. Uji *Chow Test*

Uji *Chow* merupakan pengujian estimasi model antara *common effect* dan *fixed effect* sehingga dapat menentukan model yang baik untuk digunakan dalam mengestimasi data panel. Hipotesisnya adalah:

H₀: model yang baik adalah model *common effect*.

H_a: Model yang baik adalah model *fixed effect*.

- a. Jika nilai prob > α 5% maka menerima H₀, sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang baik adalah *common effect models*.
- b. Jika nilai prob < α 5% maka menolak H₀ sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang baik adalah *fixed effect models*.

2. Uji *Hausman Test*

Uji *Hausman* merupakan pengujian estimasi model antara model *fixed effect* atau *random effect* sehingga dapat menentukan model yang baik untuk digunakan dalam mengestimasi data panel. Hipotesisnya adalah:

H₀: model yang baik adalah model *random effect*.

H_a: model yang baik adalah model *Fixed effect*.

- a. Jika nilai Prob > α 5% maka menerima H₀, sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang baik adalah *random effect models*.
- b. Jika nilai prob < α 5% kritis maka menolak H₀, sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang baik adalah *fixed effect models*.

3.4 Evaluasi Hasil Regresi

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji Koefisien determinasi (R Square) merupakan hasil yang menunjukkan bahwa variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen dan sisanya dijelaskan oleh variabel di luar model (widarjono, 2013).

2. Uji Signifikansi F

Uji F digunakan melihat pengaruh dari semua variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Y) atau untuk menguji model regresi yang kita buat signifikan atau tidak signifikan.

H₀: $\beta_1 = \beta_2 = 0$ yang artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

H₀: $\beta_1 \neq \beta_2 \neq 0$ yang artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Dengan derajat keyakinan α : 5% (0,05)

- a. Jika prob > α 5%, maka menerima H₀ yang artinya variabel independen secara bersama-sama tidak memengaruhi variabel dependen.
- b. Jika prob < α 5%, maka menolak H₀ yang artinya variabel independen secara bersama-sama memengaruhi variabel dependen.

3. Uji Signifikansi Parameter Individu (Uji T)

Uji T digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independennya

secara masing-masing terhadap variabel dependen. Uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas dengan derajat kepercayaan.

- a. Jika nilai $prob > \alpha$ 5% maka menerima H_0 yang artinya secara individu tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai $prob < \alpha$ 5% maka menolak H_0 yang artinya secara individu ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini digunakan data panel yang merupakan hasil analisis dari penelitian dengan data *time series* mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X1), Indeks Pembangunan Manusia (X2), Belanja Modal (X3), Jumlah Pegawai (X4) terhadap Realisasi Anggaran (Y) pada tahun 2016-2020 pada sejumlah data *cross section* di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di 5 kabupaten dan kota. Analisis Datapanel yang digunakan dengan melakukan pemilihan metode yang tepat dalam menganalisis hasil penelitian yaitu *common effect*, *fixed effect*, dan *random effect*. Data pada penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Dinas ketenagakerjaan, dan Dinas Pariwisata. Alat pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan perangkat lunak (*software*) Eviews 9 dengan metode analisis secara ekonometrika.

4.1 Hasil dan Model Estimasi Data

4.1.1 Uji Chow

Uji Chow digunakan dalam memilih metode estimasi antara model *common effect* dan *fixed effect* yang berdasarkan dari hasil hipotesis sebagai berikut :

Ho: $\text{prob} > \alpha$ (menerima Ho) menggunakan *Common effect*

Ha: $\text{prob} < \alpha$ (menolak Ho) menggunakan *Fixed effect*

Dengan kriteria untuk melakukan pemilihan model *common effect* atau model *fixed effect* dapat dilakukan dengan melihat hasil p-value pada regresi uji *chow* tersebut di dalam penelitian ini menggunakan $\alpha = 5\%$.

Tabel 4. 1

Hasil Regresi Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	29.872190	(4,16)	0.0000
Cross-section Chi-square	53.407499	4	0.0000

H0: *Common Effect Model*

Ha: *Fixed Effect Model*

Dari hasil uji Chow diperoleh p-value $0,0000 < \alpha$ 5% maka menolak H0 dan menerima Ha. Artinya model terbaik adalah *Fixed Effect Model*.

4.1.2 Uji Hausman Test

Uji *Hausman* digunakan dalam memilih metode estimasi model yang terbaik antara model *random effect* dengan model *fixed effect* yang berdasarkan dari hasil hipotesis sebagai berikut:

Ho: $\text{prob} > \alpha$ (menerima Ho) menggunakan model *Random effect*

Ha: $\text{prob} < \alpha$ (menolak Ho) menggunakan model *Fixed effect*

Dengan kriteria untuk pemilihan model *random effect* atau model *fixed effect* dapat dilakukan dengan melihat hasil p-value pada regresi uji *hausman* tersebut di dalam penelitian ini menggunakan $\alpha = 5\%$.

Tabel 4. 2

Period Effect

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: Untitled			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	119.488761	4	0.0000

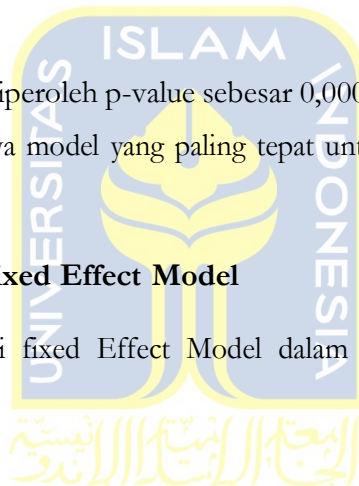
H0: Random effect Model

Ha: *Fixed Effect Model*

Dari hasil uji Hausman diperoleh p-value sebesar $0,0000 < \alpha 5\%$ maka menolak *H0* dan menerima *Ha*. Artinya model yang paling tepat untuk digunakan adalah *Fixed Effect Model*.

4.1.3 Hasil Estimasi Fixed Effect Model

Hasil uji estimasi fixed Effect Model dalam menentukan Realisasi Anggaran sebagai berikut :



Tabel 4. 3

Hasil Estimasi Fixed Effect Model

Dependent Variable: RA				
Method: Panel Least Squares				
Date: 04/08/22 Time: 13:21				
Sample: 2016 2020				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 5				
Total panel (balanced) observations: 25				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-10637.07	3439.965	-3.092204	0.0070
PAD	0.174296	0.274720	0.634451	0.5348
IPM	143.7660	39.80808	3.611479	0.0023
BM	1.044221	0.231856	4.503743	0.0004
JP	0.117678	0.050371	2.336228	0.0328
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.987715	Mean dependent var	1928.274	
Adjusted R-squared	0.981573	S.D. dependent var	409.7965	
S.E. of regression	55.62808	Akaike info criterion	11.14897	
Sum squared resid	49511.73	Schwarz criterion	11.58776	
Log likelihood	-130.3621	Hannan-Quinn criter.	11.27067	
F-statistic	160.8057	Durbin-Watson stat	1.693844	
Prob(F-statistic)	0.000000			

$$Y = -10637.07 + 0.174296it + 143.7660it + 1.044221it + 0.117678it$$

Keterangan

 β_1 = Koefisien pengaruh X1 (Pendapatan Asli Daerah) β_2 = Koefisien pengaruh X2 (Indeks Pembangunan Manusia) β_3 = Koefisien pengaruh X3 (Belanja Modal) β_4 = Koefisien pengaruh X4 (Jumlah Pegawai)

4.1.4 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Dapat dilihat dari hasil regresi di atas bahwa koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.987715, jika dipersenkan (%) sebesar 98%, yang artinya bahwa seluruh variabel independen yaitu variabel Pendapatan Asli Daerah, Indeks Pembangunan Manusia, Belanja Modal dan Jumlah Pegawai mampu menjelaskan variabel dependen yaitu variabel Realisasi Anggaran dan sisanya sebesar 2% dijelaskan oleh variabel lain diluuardari model pada penelitian ini.

4.1.5 Uji F

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama memengaruhi variabel dependen atau tidak berpengaruh.

Dari hasil estimasi didapatkan nilai probabilitas sebesar $0.0000 < \alpha = 5\%$, yang artinya menolak H_0 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu variabel Pendapatan Asli Daerah, Indeks Pembangunan Manusia, Belanja Modal dan Jumlah Pegawai secara bersama-sama mampu memengaruhi variabel dependen yaitu Realisasi Anggaran.

4.1.6 Uji T

Berdasarkan uji *random effect* yang telah dilakukan dapat kita simpulkan bahwa:

1. X_1 (Pendapatan Asli Daerah)

Dari hasil uji signifikansi didapatkan nilai koefisien 0.174296, dengan nilai probabilitas sebesar $0.5348 > \alpha = 5\%$ yang artinya variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Realisasi Anggaran di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. X_2 (Indeks Pembangunan Manusia)

Dari hasil uji signifikansi didapatkan nilai koefisien 143.7660 dengan nilai probabilitas sebesar $0.0023 < \alpha = 5\%$ yang artinya variabel Indeks Pembangunan Manusia

berpengaruh positif signifikan terhadap Realisasi Anggaran di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. X3 (Belanja Modal)

Dari hasil uji signifikansi didapatkan nilai koefisien 1.044221 dengan nilai probabilitas sebesar $0.0004 < \alpha 5\%$ yang artinya variabel Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap Realisasi Anggaran di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. X4 (Jumlah Pegawai)

Dari hasil uji signifikansi didapatkan nilai koefisien 0.117678 dengan nilai probabilitas sebesar $0.0328 < \alpha 5\%$ yang artinya variabel Jumlah Pegawai berpengaruh positif signifikan terhadap Realisasi Anggaran di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

4.2 Interpretasi Hasil

4.2.1 Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Realisasi Anggaran

Hasil dari estimasi fixed effect model diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Realisasi Anggaran, karena nilai probabilitas sebesar sebesar $0.5348 > \alpha 5\%$ yang artinya Pendapatan Asli Daerah tidak memengaruhi Realisasi Anggaran. Dalam penelitian ini peneliti tidak menemukan pengaruh PAD terhadap realisasi anggaran, dikarenakan pada tahun 2016-2020 PAD di Provinsi Yogyakarta sedang mengalami fluktuasi sehingga PAD tidak berpengaruh terhadap realisasi anggaran.

Berikut adalah presentase PAD di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta hingga tahun 2020:

2017 = 21.56%

2018 = 1.58%

2019 = 3.23%

2020 = -18.26%

Pada tahun 2020 presentase PAD di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami penurunan sebesar 18.26%, hal ini dapat disebabkan beberapa faktor, salah satu contohnya akibat pandemic covid-19 yang terjadi pada tahun 2020.

4.2.2 Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Realisasi Anggaran

Hasil dari estimasi fixed effect model diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif signifikan terhadap Realisasi Anggaran, yang artinya jika Indeks Pembangunan Manusia mengalami kenaikan sebesar 1% maka Realisasi Anggaran akan mengalami kenaikan sebesar 143.7660 miliar di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketika suatu daerah



ingin meningkatkan IPM dari beberapa indikator yang ada dalam IPM, yaitu pendidikan, kesehatan, dan angka harapan hidup yang tinggi untuk menciptakan SDM yang berkualitas. Oleh karena itu pemerintah daerah harus meningkatkan realisasi anggaran agar dapat memenuhi kebutuhan yang harus dipenuhi dalam meningkatkan indikator-indikator yang ada dalam IPM. Yang artinya IPM dan realisasi anggaran memiliki hubungan yang sangat erat, karena ketika suatu daerah ingin meningkatkan IPM maka pemerintah daerah juga harus menaikkan realisasi anggaran untuk membangun IPM di daerahnya.

Teori ini diperkuat oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Ani, 2020) menemukan bahwa SDM manusia yang baik dan berkompeten berpengaruh signifikan terhadap penyerapan realisasi anggaran Pemerintah Kota Depok. . Pengaruh positif ini menunjukkan bahwa semakin baik kualitas sumber daya manusia yang dimiliki organisasi maka akan semakin baik pula dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang berarti kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap penyerapan realisasi anggaran (APBD).

4.2.3 Analisis Pengaruh Belanja Modal terhadap Realisasi Anggaran

Hasil dari estimasi fixed effect model diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap Realisasi Anggaran, yang artinya jika Belanja Modal mengalami kenaikan sebesar 1 miliar maka Realisasi Anggaran akan mengalami kenaikan sebesar 1.044221 miliar di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bertambahnya Belanja Modal pada suatu daerah pasti juga akan memengaruhi bertambahnya Realisasi Anggaran pada suatu daerah, hal itu disebabkan karena semakin besar Belanja Modal maka akan semakin besar juga produktivitas pemerintah daerah dalam merealisasikan anggaran.

Teori ini diperkuat oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Karim, 2011) dalam penelitiannya membuktikan bahwa realisasi anggaran belanja mencakup realisasi anggaran belanja barang, belanja pegawai dan belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap perencanaan dalam realisasi anggaran.

4.2.4 Analisis Pengaruh Jumlah Pegawai terhadap Realisasi Anggaran

Hasil dari estimasi fixed effect model diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Jumlah Pegawai berpengaruh positif signifikan terhadap Realisasi Anggaran, yang artinya jika Jumlah Pegawai mengalami kenaikan sebesar 1 jiwa maka Realisasi Anggaran akan mengalami kenaikan sebesar 0.117678 miliar rupiah di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kenaikan Jumlah Pegawai maka akan mengakibatkan kenaikan jumlah Realisasi Anggaran, hal itu terjadi karena dengan bertambahnya jumlah pegawai berarti juga akan menambah beban anggaran gaji pegawai yang harus direalisasikan pemerintah daerah.

Teori ini juga diperkuat oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Karim, 2011) dalam penelitiannya membuktikan bahwa realisasi anggaran belanja mencakup realisasi anggaran belanja barang, belanja pegawai dan belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap perencanaan dalam realisasi anggaran.

4.2.5 Cross Section Effect

Persamaan *Cross Section Effect* adalah persamaan yang dihasilkan dengan menjumlahkan konstanta pada persamaan hasil estimasi dengan hasil estimasi *Cross Section Effect*.

Perbedaan Konstanta pada setiap Kabupaten dan Kota dapat dilihat dari hasil persamaan *Cross Section Effect* sebagai berikut:

Tabel 4. 4

Cross Section Effect

	KABUPATE...	Effect
1	Kulon Progo	421.2606
2	Bantul	-0.260327
3	Gunung Kidul	1117.274
4	Sleman	-383.6748
5	Yogyakarta	-1154.599

Berdasarkan tabel di atas bahwasanya Kabupaten Gunung Kidul memiliki nilai konstanta tertinggi yaitu sebesar 1117.274 sedangkan Kota Yogyakarta memiliki nilai konstanta terendah yaitu -1154.599.

4.2.6 Period Effect

Persamaan *Period Effect* adalah persamaan yang dihasilkan dengan menjumlahkan konstanta pada persamaan hasil estimasi dan hasil estimasi masing-masing periode waktu tertentu, di mana dalam kasus ini ada 5 periode waktu yaitu tahun 2016-2020.

Tabel 4. 5

Period Effect

	DATEID	Effect
1	2016-01-01	251.6115
2	2017-01-01	16.15031
3	2018-01-01	-64.07288
4	2019-01-01	-9.948404
5	2020-01-01	-193.7406

Berdasarkan tabel di atas bahwasanya pada tahun 2016 memiliki nilai *period effect* tertinggi yaitu sebesar 251.6115 kemudian nilai *period effect* terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar -193.7406.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang didapat tentang Analisis Determinan Realisasi Anggaran di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2016-2020 maka dapat disimpulkan bahwa

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Realisasi Anggaran, dikarenakan pada tahun 2016-2020 PAD di Provinsi Yogyakarta sedang mengalami fluktuasi sehingga PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap realisasi anggaran.
2. Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif signifikan terhadap Realisasi Anggaran, dikarenakan jika suatu daerah ingin meningkatkan IPM dari beberapa indikator yang ada dalam IPM, yaitu pendidikan, kesehatan, dan angka harapan hidup yang tinggi, pemerintah daerah harus meningkatkan realisasi anggaran agar dapat memenuhi kebutuhan yang harus dipenuhi dalam meningkatkan indikator-indikator yang ada dalam IPM. Yang artinya IPM dan realisasi anggaran memiliki hubungan yang sangat erat, karena ketika suatu daerah ingin meningkatkan IPM maka pemerintah daerah juga harus menaikkan realisasi anggaran untuk membangun IPM di daerahnya.
3. Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap Realisasi Anggaran, dikarenakan bertambahnya Belanja Modal pada suatu daerah pasti juga akan memengaruhi bertambahnya Realisasi Anggaran pada suatu daerah, hal itu disebabkan karena semakin besar Belanja Modal maka akan semakin besar juga pengeluaran pemerintah daerah dalam merealisasikan anggaran.
4. Jumlah Pegawai berpengaruh positif signifikan terhadap Realisasi Anggaran, dikarenakan, kenaikan Jumlah Pegawai maka akan mengakibatkan kenaikan jumlah Realisasi Anggaran, hal itu terjadi karena dengan bertambahnya jumlah pegawai berarti juga akan menambah beban anggaran gaji pegawai yang harus direalisasikan pemerintah daerah.

5.2 Implikasi dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang ada pada sub bab sebelumnya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan guna menganalisis determinan Realisasi Anggaran dalam suatu daerah di Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dari keempat (4) variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Indeks Pembangunan Manusia, Belanja Modal, dan Jumlah Pegawai. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu mempertimbangkan dan memberikan berbagai kebijakan oleh pemerintah daerah itu sendiri, dengan beberapa pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1. Variabel Pendapatan Asli Daerah terbukti tidak berpengaruh terhadap Realisasi Anggaran. Meskipun begitu pemerintah daerah tetap harus memperhatikan objek-objek seperti objek wisata yang berpotensi dapat mendorong kemajuan dalam meningkatkan perekonomian dalam suatu daerah dari berbagai kabupaten dan kota melalui realisasi anggaran yang dikeluarkan.
2. Variabel Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif signifikan terhadap Realisasi Anggaran. Dalam rangka memajukan perekonomian dalam sebuah daerah perlu adanya beberapa indikator IPM yang juga dapat mendorong pemerataan pembangunan perekonomian melalui anggaran yang direalisasikan pemerintah daerah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan, semakin tinggi indikator IPM dalam suatu daerah maka pemerintah daerah juga akan semakin tinggi pula dalam merealisasikan anggaran yang dimiliki dan dikelolanya seharusnya.
3. Variabel Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap Realisasi Anggaran. Dalam hal ini Belanja Modal bersifat menambah aset tetap atau inventaris yang memberikan manfaat lebih dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas aset dalam suatu daerah. Realisasi Anggaran yang akan dikeluarkan pemerintah dapat menambah aset atau kekayaan dalam suatu daerah itu sendiri.
4. Variabel Jumlah Pegawai berpengaruh positif signifikan terhadap Realisasi Anggaran. Dalam memajukan perekonomian dari suatu daerah Pemerintah harus berani memakmurkan jumlah pegawai dari Realisasi Anggaran untuk memberikan gaji pegawai yang dapat mendorong produktivitas dalam memajukan perekonomian daerah

tersebut, semakin besar anggaran yang untuk beban gaji Jumlah Pegawai, semakin besar juga Realisasi Anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah daerah tersebut. Kenaikan jumlah pegawai juga akan meningkatkan anggaran yang cukup besar sehingga pemerintah daerah perlu berhati-hati dalam menambah jumlah pegawai yang artinya penambahan tersebut adalah yang benar-benar dibutuhkan dan diperlukan adanya efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.



DAFTAR PUSTAKA

- Ani. (2020). *Analisis Determinasi Penyerapan Anggaran di Kota Depok menemukan bahwa SDM manusia yang baik dan berkompeten berpengaruh signifikan terhadap penyerapan realisasi anggaran Pemerintah Kota Depok*. Depok: Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan.
- Astria Nur Jannah Dien, J. T. (2015). *Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Dinas Pendapatan di Kota Bitung*. Manado: Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Bastian, I. (2006). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Daling, M. (2013). *Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Minahasa Tenggara*. Minahasa Tenggara: EMBA Vol.1 no.3.
- Hasibuan, M. (2007). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT. Bumi Aksa.
- Halim. (2007). *Pengaruh PAD, DAU, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Sulawesi Utara*: Jurnal Studi Akuntansi.
- Indonesia, P. (2014). *Undang-undang nomor 23*. Jakarta: 2014.
- Indonesia, P. (2004). *Undang-undang nomor 32*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Indonesia, P. (1999). *Undang-undang nomor 22*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Indonesia, P. (1999). *Undang-undang nomor 22*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Indonesia, P. (2004). *Undang-undang nomor 33*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Indonesia, P. (2006). *Permendagri Nomor 13 tahun*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Karim, M. (2011). *Mustaqim Karim (2011) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Realisasi Anggaran Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal terhadap Realisasi Anggaran*. Kabupaten Banggai: Jurnal Studi Akuntansi.
- Kuncoro, M. (2015). *Mengapa Terjadi Growth Without Development di Provinsi Kalimantan*
- Kumorotomo, W. (2005). *Kajian Historis dan Isu-isu Kontemporer untuk Merumuskan Agenda Masa Depan ilmu Administrasi Publik*. Yogyakarta: 2005.
- Timur? Kalimantan Timur*: Jurnal Ekonomi Pembangunan.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Muindro, R. (2012). *Organisasi Non Laba*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Muindro, R. (2012). *Organisasi Non Laba*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Mursyidi. (2009). *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Musanef. (1984). *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.
- Nuarisa. (2013). *Pengaruh PAD, DAU, DAK terhadap Pengalokasian Anggaran*. Jawa Tengah: Accounting Analysis Journal.
- Rusdi. (2018). *Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah*

Daerah Kabupaten Enrekang. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.

Rukayah, N. K. (2017). *Analisis Laporan Realisasi Anggaran Dengan Menggunakan Rasio Efektivitas Dan Rasio Efisiensi Pada Kantor Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang*. Kabupaten Serang: Jurnal Akuntansi Vol.4No.2.

Statistik, B. P. (2007). *Statistik Indonesia 2007*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Statistik, B. P. (2015). *Statistik Indonesia 2015*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

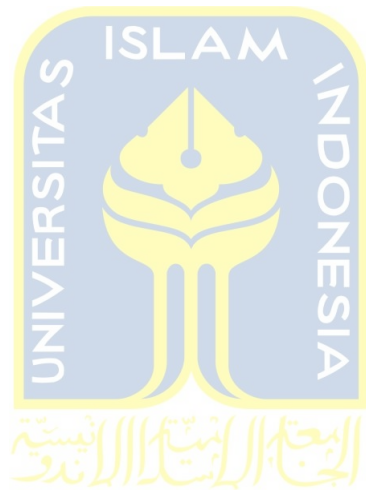
Statistik, B. P. (2015). *Statistik Indonesia 2015*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Suharno. (2008). *Prinsip-prinsip Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press.

Wibawa, S. (2011). *Kebijakan Populis Kabupaten Bantul*. Kabupaten Bantul: Proceeding Simposium Nasional Otonomi Daerah 2011.

Widhiari, N. L. (2015). *Pengaruh Rasio Likuiditas, Leverage, Operating Capacity, dan Sales Growth Terhadap Financial Distress*. Bali: E-Jurnal Akuntansi.





LAMPIRAN

Data Penelitian

Kabupaten/Kota	Tahun	Realisasi Anggaran(Y)	PAD (X1)	IPM (X2)	BM (X3)	JP (X4)
Kulon Progo	2016	1.406,49	180,27	72,38	259,88	7085
Kulon Progo	2017	1.430,46	249,69	73,23	258,77	6503
Kulon Progo	2018	1.481,01	211,05	73,76	340,49	6203
Kulon Progo	2019	1.671,66	237,88	74,44	421,94	6245
Kulon Progo	2020	1.500,04	254,42	74,46	323,35	5840
Bantul	2016	2.016,54	404,45	78,42	284,06	9193
Bantul	2017	2.076,74	494,18	78,67	332,62	8445
Bantul	2018	2.165,65	462,65	79,45	338,16	8009
Bantul	2019	2.283,59	505,93	80,01	336,71	8004
Bantul	2020	2.093,72	479,61	80,01	216,40	7371
Gunung Kidul	2016	1.651,55	206,28	67,82	234,69	9880
Gunung Kidul	2017	1.860,23	271,37	68,73	396,85	8714
Gunung Kidul	2018	1.772,31	226,98	69,24	304,84	8410
Gunung Kidul	2019	2.132,22	254,81	69,96	493,78	8397
Gunung Kidul	2020	1.775,06	228,21	69,98	254,89	8104
Sleman	2016	2.455,45	717,15	82,15	344,00	10164
Sleman	2017	2.489,60	825,64	82,85	380,63	9266
Sleman	2018	2.580,09	894,27	83,42	411,31	8833
Sleman	2019	2.777,00	972,05	83,85	451,53	8906
Sleman	2020	2.532,17	788,25	83,84	361,07	8288
Yogyakarta	2016	1.665,42	540,50	85,32	259,59	6080
Yogyakarta	2017	1.484,92	657,05	85,49	294,31	5475
Yogyakarta	2018	1.652,73	667,49	86,11	325,09	5226
Yogyakarta	2019	1.734,59	689,05	86,65	327,43	5223

Yogyakarta	2020	1.517,60	563,17	86,61	193,52	4876
------------	------	----------	--------	-------	--------	------



PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ilmu Ekonomi Pembangunan FBE UII. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Mei 2022

Penulis,



Devandra Ananda Srivintara

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Analisis Determinan Realisasi Anggaran di Daerah Istimewa Yogyakarta Pada Tahun
2016-2020

Nama : Devandra Ananda Srivintara
Nomor Mahasiswa : 18313324
Program Studi : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, 18 Mei 2022

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing



Suharto S.E., M.Si.



BERITA ACARA REVISI TUGAS AKHIR/ SKRIPSI

Pada tanggal di bawah ini telah dilaksanakan ujian tugas akhir atas:

Nama : **DEVANDRA ANANDA SRIVINTARA**

No. Mahasiswa : **18313324**

Materi tugas akhir yang direvisi/diperbaiki:

Halaman	Hal-hal yang perlu diperbaiki
	Cek penulisan
	Tambahkan soal dana keistimewaan di latar belakang
	Landasan untuk hipotesis belanja modal
	Hitung persentase pad sbg penjelasan hasil regresinya
	Cek dan tambahkan penjelasan tentang koefisien regresi jika belum ada
	Saran fokus ke realisasi anggaran

Tugas akhir tersebut diatas: Diuji lagi/Tidak diuji lagi *)

Tanggal Ujian : 24 Juni 2022

Penguji,

Awan Setya Dewanta, Drs., M.Ec.Dev.

Pembimbing,

Suharto, S.E., M.Si.

Telah direvisi/diperbaiki tanggal :

30 Juni 2022.....

Penguji,

Awan Setya Dewanta, Drs., M.Ec.Dev.

Pembimbing,

Suharto, S.E., M.Si.

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

*) Batas Revisi 2 (dua) bulan setelah ujian dilaksanakan jika melebihi batas, kelulusan dinyatakan BATAL dan wajib mengulang ujian. (Buku panduan akademik tentang aturan ujian skripsi dan komprehensif)

Revisi Berita Acara yang telah ditandatangani pembimbing dan penguji diserahkan ke Divisi Akademik (akademik.fbe@uii.ac.id)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**ANALISIS DETERMINAN REALISASI ANGGARAN DI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA PADA TAHUN 2016-2020**

Disusun Oleh : **DEVANDRA ANANDA SRIVINTARA**

Nomor Mahasiswa : **18313324**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari, tanggal: **Jumat, 24 Juni 2022**

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Suharto,,S.E., M.Si.

Penguji : Awan Setya Dewanta,Drs.,M.Ec.Dev.



Mengetahui

Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia



Johan Arifin, SE., M.Si, Ph.D., CFrA



Nama Mahasiswa : **DEVANDRA ANANDA SRIVINTARA**
No. Mahasiswa : **18313324**

Penelitian:

**ANALISIS DETERMINAN REALISASI ANGGARAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PADA TAHUN
2016-2020**

Naskah Publikasi telah di review oleh Tim Penguji pada tanggal, 24 Juni 2022 dengan hasil ^{*)}:

- ~~1. Layak dipublikasikan tanpa perbaikan~~
2. Layak dipublikasikan dengan perbaikan
- ~~3. Tidak layak dipublikasikan~~

Penguji,

Awan Setya Dewanta, Drs., M.Ec.Dev.

Pembimbing,

Suharto, S.E., M.Si.

Telah direvisi/diperbaiki tanggal : 30 Juni 2022.....

Penguji,

Awan Setya Dewanta, Drs., M.Ec.Dev.

Pembimbing,

Suharto, S.E., M.Si.

^{*)} Coret yang tidak perlu

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

Bismillahirrahmannirrahim

Pada Semester Genap 2021/2022, hari, tanggal Jumat, 24 Juni 2022 Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII telah menyelenggarakan Ujian Tugas Akhir/Skripsi yang disusun oleh:

Nama : **DEVANDRA ANANDA SRIVINTARA**
No. Mahasiswa : **18313324**
Judul Tugas Akhir : **ANALISIS DETERMINAN REALISASI ANGGARAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PADA TAHUN 2016-2020**
Pembimbing : **Suharto,,S.E., M.Si.**

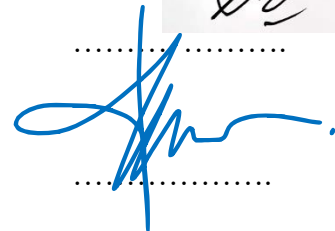
Berdasarkan hasil evaluasi Tim Dosen Penguji Tugas Akhir, maka Tugas Akhir/Skripsi tersebut dinyatakan:

- 1. Lulus Ujian Tugas Akhir *)**
 - ~~a. Tugas Akhir tidak direvisi~~
 - b. Tugas Akhir perlu direvisi
- ~~2. Tidak Lulus Ujian Tugas Akhir~~

Nilai : **A**.....
Referensi : Layak/Tidak Layak *) ditampilkan di Perpustakaan

Tim Penguji
Ketua Tim : **Suharto,,S.E., M.Si.**

Anggota Tim : **Awan Setya Dewanta,Drs.,M.Ec.Dev.**



Yogyakarta, 24 Juni 2022
Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi


Sahabudin Sidiq, Dr., SE., MA.

Keterangan:

*) *Coret yang tidak perlu*
- Bagi yang lulus Ujian Tugas Akhir dan
Komprehensif, segera konfirmasi ke Divisi
Akademik